

# IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

Ityan Habibi 1610511010<sup>1</sup> Akbar Maulana S.IP., M.Si. 1987070912003923<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Email: [habibyityn07@gmail.com](mailto:habibyityn07@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah kepala bidang penyanggah masalah kesejahteraan sosial lanjut usia, fakir miskin, korban bencana dan kepala Seksi serta staf pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini adapun responden dan informan yang merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman yang baik mengenai isu-isu tertentu. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi pelayanan sosial fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pelayanan Sosial, Fakir Miskin

## ABSTRACT

*This study aims to find out how the implementation of poor social services in the Jember Regency social service has been well implemented. The research method uses a qualitative descriptive approach. The object research is the head of the sector with the problem of elderly social welfare, the poor, disaster victims and section heads as well as the poor's social service and rehabilitation staff in the social service district of Jember. Data collection through interviews, observation, and documentation. In this study, the respondents and informants who are people who really know the problems to be studied and the resource persons who have expertise and a good understanding of certain issues. The results of this study illustrate how the services and rehabilitation of the poor conducted by the Jember district social service.*

**Keywords :** Implementation, Social Service, The poor

## I. PENDAHULUAN

fakir miskin merupakan seseorang atau kepala keluarga yang

sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan ataupun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun

orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana UU RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, dan pemerintah daerah, atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Bagi fakir miskin seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan sosial sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin agar terpenuhinya hak dasar atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan peran dari berbagai elemen seperti masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, maupun lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah terpadu dan berkelanjutan.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Masalah Kemiskinan merupakan hal yang perlu untuk di atasi. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 265.100 penduduk, pada tahun 2017 penduduk miskin berjumlah 266.900 penduduk, dan pada tahun selanjutnya yaitu 2018

penduduk miskin berjumlah 243.420 penduduk. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun tersebut yaitu pada tahun 2016, 2017, hingga 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan meskipun tidak secara signifikan, tapi hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pengetasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Jember baik program yang menyentuh secara langsung pada rumah tangga penerima manfaat maupun dalam program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Namun meskipun ada penurunan akan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya Jember masih menduduki peringkat ke 22 kabupaten termiskin dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa angka kemiskinan di Jember masih cukup tinggi.

Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah di daerah telah melakukan atau melaksanakan pendataan fakir miskin untuk diberikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Akan tetapi data yang ada mencapai angka yang cukup tinggi. Padahal pendataan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, akan tetapi dibantu oleh beberapa instansi lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Namun yang terjadi di lapangan masyarakat miskin di Kabupaten Jember jumlahnya terus meningkat dan bahkan terus bertambah dari tahun ke tahun. Data yang valid merupakan pondasi dasar dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah pada program

selanjutnya. Oleh karena itu, menurut peneliti data adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan program pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin. Berikut adalah jumlah data fakir miskin yang ada di Kabupaten Jember dari instansi Dinas Sosial :

Tabel Jumlah fakir miskin Jember tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	693.371 (Jiwa)
2.	2017	65.993 (KK)
3.	2018	693.451 (Jiwa)

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa data yang diperoleh ternyata dari tahun ke tahun mengalami penurunan, adapun angka tersebut menurun tapi hanya sedikit dan tidak signifikan, sedangkan pada tahun 2019 s/d 2020 pihak pemerintah dalam hal ini dinas sosial tidak melakukan pendataan terhadap fakir miskin yang ada diwilayahnya. Hal ini menyebabkan warga miskin yang ada di jember tidak diketahui keberadaan maupun jumlahnya sehingga hal ini menjadi kajian dasar bagi peneliti untuk memberikan pemahaman dan solusi dengan berlandaskan teori yang ada. Sedangkan, menurut data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, program dan kegiatan yang dijalankan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas sosial hanya sebatas pemberian bantuan sembako dan sarana prasana. Program dan kegiatan tersebut juga dianggarkan dengan angka yang cukup besar, akan tetapi meskipun program telah dijalankan masih saja terdapat fakir miskin di Kabupaten Jember. Oleh

karena itu, perlu adanya tindakan yang komperhensif dari pemerintah Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan melalui program maupun pelayanan sosial bagi fakir miskin. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita angkat sebagai judul skripsi yaitu mengenai **“IMPLEMENTASI PELAYANAN SOSIAL FAKIR MISKIN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka secara umum yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember?

### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana proses dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

### **Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan bagi para kalangan akademisi pada bidang ilmu pemerintahan yaitu mengenai Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan sosial khususnya dalam penanganan

fakir miskin di Kabupaten Jember.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu.

Pada penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Dinas Sosial yang memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di kabupaten jember.

Nama Instansi: Dinas Sosial Kabupaten Jember

Alamat : Jl. PB Sudirman No.38, Kp. Using, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

#### B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar satu bulan, dari tanggal 12 Desember 2019 sampai tanggal 10 Januari 2020.

Tanggal: 12 Desember 2019-11 Januari 2020.

Hari : Senin-Jumat.

### Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan suatu informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### Metode Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

### **Metode Pengumpulan Data**

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### **1. Wawancara**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan.

#### **2. Observasi**

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku penerbitan perijinan serta perilaku

masyarakat yang sedang mengurus izin lokasi.

#### **3. Dokumentasi**

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu:

- a. pengumpulan data,
- b. reduksi data,
- c. penyajian data dan
- d. penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong (2004:280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data".

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan

validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi 6°27'29" s/d 7°14'35" Bujur Timur dan 7°59'6" s/d 8°33'56" Lintang Selatan dengan wilayah seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dan memiliki ± pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, disebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah barat Kabupaten Lumajang.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri dari 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km<sup>2</sup> atau 0,76%. Jumlah luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.092,34 Km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk 35 pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk pemukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %. Jember

dikenal dengan sebutan “daerah 1000 gumuk atau bukit” karena memiliki setidaknya 1.666 bukit tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

### **Program Program Pelayanan Sosial Fakir Miskin**

Kemiskinan di Kabupaten Jember merupakan suatu permasalahan yang sangat penting untuk diatasi, Pemerintah Jember sebagai pemilik tanggung jawab di Kabupaten Jember telah melakukan berbagai usaha dalam mengatasi kemiskinan yang ada di daerahnya dengan membuat berbagai kebijakan sebagai upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial merupakan salah satu bagian dari lembaga pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki fokus dalam pembangunan kesejahteraan sosial hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2009 yaitu tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Pada pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan dinas sosial terdapat beberapa fokus salah satunya yaitu mengatasi kemiskinan, dalam mengatasi kemiskinan dinas sosial berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah (RIKSD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dinas sosial dalam melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan melalui sebuah seksi yang terdapat dalam bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana yaitu pada seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin, dimana pada seksi tersebut menjalankan sebuah kebijakan yaitu pelayanan sosial terhadap fakir miskin dimana terdapat beberapa program yang dijalankan. Menurut wawancara peneliti dengan seorang informan yaitu Bapak Agus Pujiharto, S.Sos selaku kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia, fakir miskin dan korban bencana memberikan keterangan sebagai berikut :

“Dalam pelayanan sosial fakir miskin ini ada dua program yang akan di berikan kepada stakeholder atau dalam hal ini masyarakat miskin, yaitu program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan yang kedua program pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.” (wawancara 19 Desember 2019).

Dari keterangan atau informasi yang sudah di jelaskan oleh informan sebelumnya sudah cukup jelas, akan tetapi ada tambahan informasi tentang penjelasan mengenai bentuk kegiatan program dari Bapak

Hariyono yaitu selaku staf seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin sebagai berikut :

“Jadi untuk bentuk dari program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin ada dua kegiatan pertama bimtek dan rakor pkh yang kedua pengadaan seragam pkh untuk sarannya operator dan pendamping pkh, sementara untuk program kedua yaitu program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin dalam bentuknya ada beberapa kegiatan seperti pendistribusian bantuan sembako, pemberian bantuan bahan pokok bagi fakir miskin dengan sasaran fakir miskin” (wawancara,19 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam kebijakan pelayanan sosial fakir miskin ini terdapat dua program yaitu Program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi usaha keluarga miskin dengan pemberian bantuan pokok bagi fakir miskin. Kedua program tersebut merupakan beberapa program andalan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Jember melalui seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif yakni membantu fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Pada pelaksanaan implementasi pelayanan sosial fakir miskin di dinas sosial Kabupaten Jember ini terdapat beberapa komponen yang terlibat, dimana selain Dinas Sosial Kabupaten Jember, terdapat

komponen lain yang terlibat yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dalam hal ini merupakan seseorang yang diberi tugas dan fungsi maupun kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas atau Instansi Provinsi, Dinas atau Instansi Kabupaten dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasannya di Kecamatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) memiliki tugas untuk membantu Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah pelayanan sosial fakir miskin.

Analisis Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan teori *George Edward III* ada 4 variabel yang menentukan Implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dalam sub-subbab berikut peneliti mengkajinya satu persatu sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga untuk informasi yang disampaikan harus sesuai dan akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan juga adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan hal yaitu, transmisi dan kejelasan serta konsistensi yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Berikut beberapa faktor komunikasi yang terjadi dalam implementasi pelayanan sosial di dinas sosial Kabupaten Jember:

#### **a. Transmisi (Penyaluran)**

Transmisi merupakan faktor utama dalam aktor hal komunikasi pelaksana kebijakan. Transmisi dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu berupa Koordinasi antara dinas sosial dengan koordinator lapangan yaitu Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan masyarakat dalam pelaksanaan program pelayanan sosial fakir miskin disampaikan secara langsung. Berikut wawancara dengan kepala bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia, fakir miskin, dan korban bencana:

“komunikasi yang kami (dinas sosial) berikan kepada koordinator lapangan dan masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin secara langsung yaitu melalui proses sosialisasi.” (wawancara



24 Desember 2019 dengan Kepala Bidang PMKS lansia, fakir miskin, dan korban bencana, Bpk Agus Pujiharto, S.Sos).

b. Kejelasan

Faktor kedua adalah kejelasan. Kejelasan pada komunikasi sangat menentukan akan keberhasilan suatu implementasi pada sebuah kebijakan publik. Jika kebijakan tersebut diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Kejelasan Komunikasi dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin, terdiri dari penyampaian informasi oleh dinas sosial kepada koordinator lapangan dan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung, hal tersebut dinilai sudah benar dan efisien, agar seluruh pelaksana maupun penerima mengetahui secara jelas informasi apa saja yang telah disampaikan dan apabila ada informasi terbaru tentang pelayanan sosial fakir miskin.

c. Konsistensi

Faktor Ketiga yaitu Konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus memiliki konsistensi dan jelas untuk ditetapkan maupun dijalankan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Pada hal ini, melihat apakah informasi yang telah disampaikan terkait dengan implementasi pelayanan sosial fakir miskin sudah sangat konsisten dan tidak ada perbedaan dengan informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang

diperoleh peneliti dari salah satu anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa dalam penyampaian informasi berkaitan dengan pelayanan sosial fakir miskin sudah baik tidak ada tumpang tindih antara satu sama lain, semua informasi yang diberikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi, dengan kata lain dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh dinas sosial sudah konsisten.

**Sumber Daya**

sumberdaya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Pada sumberdaya terdapat beberapa faktor yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas.

a. Sumber Daya Staf atau Manusia  
Staf atau manusia merupakan sumber daya utama yang harus ada pada suatu implementasi. Karena sebuah implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya staf yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, dalam implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember ini membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (staf) yang dimaksud dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin adalah kepala dinas, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

b. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dengan sumber daya lainnya dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin. Sumber daya fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, transportasi, dan peralatan pembantu akan sangat menunjang implementasi suatu kebijakan. sumber daya fasilitas yang dimiliki dinas sosial dalam mendukung agar terlaksananya implementasi pelayanan sosial fakir miskin yaitu seperti gedung, kendaraan, serta komputer. Fasilitas yang dimaksud tersebut sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

c. Sumber Daya Anggaran

merupakan suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan jelas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pada sumber daya anggaran pelayanan sosial fakir miskin ini peneliti sudah berusaha untuk mencari maupun meminta data secara langsung kepada pihak dinas terkait mengenai data anggaran dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Namun peneliti tidak mendapatkan data tersebut, dugaan peneliti data tersebut dirahasiakan sehingga tidak dapat di publikasi.

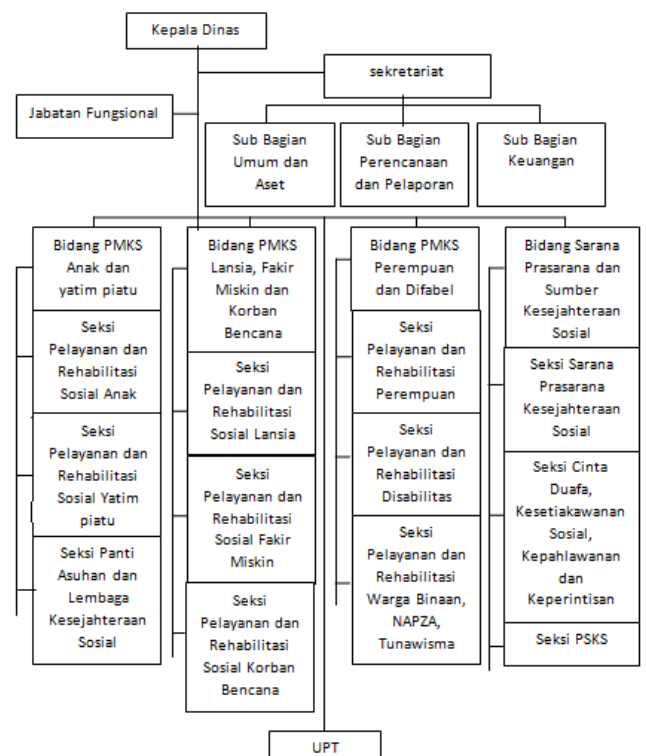
**Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin. Pada struktur birokrasi sendiri terdapat dua karakteristik, yaitu, Fragmentasi dan prosedur kerja ukuran dasar atau sering

disebut Standar Operating Procedure (SOP).

a. Fragmentasi

merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin, besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Struktur organisasi pada dinas sosial Kabupaten Jember menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Pada struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian terhubung dengan rantai komando langsung ke kepala dinas. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember :



Berdasarkan gambar bagan struktur tersebut, Pada dinas sosial terdapat 4 bidang yakni Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu, Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana, Bidang PMKS Perempuan dan Difabel, serta Bidang Sarana prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Untuk kebijakan pelayanan sosial fakir miskin ini dipegang oleh Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana.

b. (SOP) Standart Operating Procedure

merupakan perkembangan dari adanya tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor. Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Menurut wawancara dengan kepala seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin yaitu Bapak Didik, S.Sos:

“Jadi ya dek Pada pelaksanaan pelayanan sosial fakir miskin ini kami dari dinas sosial kabupaten jember belum memiliki prosedur

kerja jadi untuk kami menggunakan undang-undang nomer 13 tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaan, begitu dek”.(Wawancara,27 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial ini belum memiliki SOP atau prosedur kerja, sehingga dalam hal ini Dinas Sosial masih menggunakan sebuah konsep yaitu petunjuk makro dalam implementasi ini yaitu undang-undang nomer 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dengan belum adanya SOP yang jelas mengakibatkan kurang optimalnya pelaksana dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Sosial dalam implementasi pelayanan dan rehabilitasi sosial fakir miskin ini belum mempunyai SOP, sedangkan struktur birokrasi sangat baik yaitu yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.

### **Disposisi**

Merupakan watak ataupun karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki

pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut. Pada disposisi terdapat dua faktor penting, yaitu seleksi personil dan insentif.

a. Seleksi Personil

Seleksi personil merupakan salah satu faktor utama, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus pada kepentingan warga. Pengangkatan atau seleksi personil untuk jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun tidak ada seleksi secara resmi yang dilaksanakan dikarenakan dalam pengangkatan personil pada struktural dilakukan atas rekomendasi dari dinas sosial.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan bisa menjadi faktor pendorong yang membuat yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi

atau organisasi. Pemberian insentif pada pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jember yaitu berupa pemberian honorarium yang merupakan pemberian imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dimana pemberian honorarium dilaksanakan pada saat ada kegiatan yang dilaksanakan.

### Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah berjalan cukup baik dengan adanya beberapa program sebagai pendukung dalam pelaksanaannya seperti program fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan program sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Kemudian, berdasarkan uraian pada pembahasan yang di dapat sesuai dari hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Sosial Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Jember dilihat dari teori George Edward III adalah sebagai berikut :

a. komunikasi, bahwa dalam hal ini terdapat tiga variabel yang digunakan yang pertama yaitu transmisi pada variabel ini dinas sosial melakukan koordinasi yang baik dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan masyarakat melalui rapat dan sosialisasi. Kemudian yang kedua yaitu Kejelasan dalam hal ini penyampaian informasi yang diberikan sudah sangat jelas karena dilakukan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah konsistensi dimana

dalam penyampaian informasi berkaitan dengan pelayanan sosial fakir miskin sudah baik tidak ada tumpang tindih antara satu sama lain, semua informasi yang diberikan sesuai dan sama dengan penjelasan yang diberikan oleh pemberi informasi.

- b. Sumber daya, bahwa dalam sumber daya yang pertama yaitu personil adanya keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan sosial fakir miskin ini seperti dinas sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Dengan adanya keterlibatan yang baik dari semua pihak maka implementasi dari pelayanan sosial fakir miskin akan berjalan baik dan sesuai. Kemudian untuk sumber daya fasilitas untuk implementasi pelayanan sosial fakir miskin ini sudah memenuhi. Sementara itu untuk sumber daya anggaran peneliti tidak mendapatkan data tentang anggaran, dugaan peneliti data tersebut dirahasiakan sehingga tidak dapat di publikasi.
- c. Struktur Birokrasi, bahwa pada hal ini Dinas Sosial dalam implementasi pelayanan sosial fakir miskin ini belum mempunyai SOP, sedangkan struktur birokrasi sangat baik yaitu yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- d. Disposisi, untuk disposisi terdapat dua variabel yang pertama seleksi personil yaitu dalam hal ini seleksi diadakan

oleh BKD namun atas rekomendasi dari Dinas Sosial. Selanjutnya insentif yang dilakukan dengan pemberian honorarium atau pemberian imbalan jasa kepada pegawai setiap melaksanakan program.

### Saran

- a. Perlu adanya pendataan terbaru mengenai data fakir miskin di Kabupaten Jember untuk tiap tahunnya, agar pemerintah lebih mudah dalam mengambil kebijakan dan bisa mengevaluasi apakah sudah tepat sasaran atau tidak.
- b. Perlu agar lebih memanfaatkan sarana informasi yang ada untuk mengakses dan memberikan data informasi yang transparansi agar bisa diperoleh dan diketahui oleh pemerintah itu sendiri dan masyarakat.
- c. Perlu segera diterbitkan SOP sebagai inti di dalam suatu lembaga ataupun instansi pemerintahan agar nantinya dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam setiap adanya pelaksanaan kebijakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ilfan Baharudin, 2018. *Jurnal Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kelurahan Gubuksuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan.*
- Andi Fitrah P. Putra, Juanda Nawawi, Rahmatullah, 2016. *Jurnal Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada Program UEP dan KUBE.*

- Ndunn, William 2002. *Analisis Kebijakan Publik* edisi ke-2.
- Haerah Kahar Drs. M.Si, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.
- M.Afrinaldi, 2017. *Jurnal Efektivitas Program Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar Studi Kasus Bantuan Peningkatan Ketrampilan di Kelurahan Sungai Pagar*.
- J.Moeleong, Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Revly Sian Lizard, Marthen Kimbal, Marlien Lopian, 2017. *Jurnal Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado*.
- Muhammad Hasanurrisqi, Annisa Rahmadanita, 2018. *Jurnal Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Program Kube oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tanahgrogot Kabupaten Panser Provinsi Kalimantan Timur*.
- Hardiansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Lembaga Administrasi, 2004. *System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI); Dalam landasan dan pedoman pokok penyelenggaraan dan pengembangan system administrasi negara*.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Adi, Isbandir Rukminto, 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Jakarta : UI Press.
- Ismawan, Bambang, 2000. *Pemberdayaan Orang Miskin, Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Jakarta : Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Peraturan Perundang-undangan :**  
Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.  
Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.  
Peraturan daerah kabupaten jember nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.